

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Auditing didefinisikan sebagai proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Konrath, 2010). Tujuan akhir dari proses auditing inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya (opini) kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan (Arens, 2008).

Profesi akuntan publik merupakan jabatan kepercayaan masyarakat umum, maka akuntan publik dituntut tidak boleh memihak kepada siapapun dan jujur seperti yang dinyatakan dalam Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang berhubungan dengan penugasan independensi auditor harus dipertahankan (IAI,SPAP, 2011). Sehingga independensi merupakan aspek yang sangat penting dan unik dari profesi akuntan publik, karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi penilaian (akreditasi) atas laporan keuangan. Independensi merupakan sikap yang tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun.

Menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar laporan. Selain standar –standar yang harus ditaati, akuntan publik dituntut untuk dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka terima dari klien dan pihak ketiga dengan cara mempertahankan independensinya. Sering terjadi benturan-benturan dapat mempengaruhi independensi akuntan publik dimana klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan sisi lain akuntan publik harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional yaitu harus dapat mempertahankan sikap independen. Semakin memburuknya independensi auditor akhir-akhir ini menjadi penyebab terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi diberbagai perusahaan publik (Rimawati, 2011:2)

Apabila seorang auditor independen atau suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Dalam penelitian Widodo (2004)

untuk diakui sebagai seorang yang independen, akuntan publik tidak hanya bersifat objektif dan tidak memihak tetapi harus pula menghindari keadaan-keadaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas sikapnya.

Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini senada dengan *America Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) yang menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan obyektivitas. Meskipun integritas dan obyektivitas tidak dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Namun saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan seorang akuntan publik terlebih masalah independensi.

Auditor tersebut harus mampu mempertahankan sikap independensi dalam kenyataan (*in fact*) sepanjang pelaksanaan audit dan independensi dalam penampilan (*in appearance*) untuk menjaga perilaku auditor sebagai profesional dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pemakai laporan keuangan (Nini dan Trisnawati, 2009:176). Memburuknya independensi auditor akhir-akhir ini menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi di berbagai perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak auditor (akuntan publik) sebagai pihak yang

dianggap independen dalam pengauditan laporan keuangan klien, ditengarai berperilaku secara tidak profesional.

Komite audit merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Keberadaan komite audit di Indonesia dipertegas dengan keputusan Bapepam yang dituangkan dalam SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan juga Kep. Direksi BEJ No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor.

Namun, keberadaan komite audit saja belum cukup untuk menghindarkan perusahaan dari kasus-kasus keuangan terutama kasus independensi akuntan publik. Komite audit ternyata juga membutuhkan independensi dan efektivitasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, peraturan tersebut dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep 29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan yang terdaftar pada BEJ harus memiliki komite audit.

Penelitian yang telah dilakukan oleh *AAA Financial Accounting Standards Committee* (2000) tentang independensi menunjukkan bahwa dalam pengambilan

keputusan akuntan publik cenderung dipengaruhi oleh dorongan untuk mempertahankan klien auditnya, pengaruh budaya masyarakat dan organisasi terhadap pribadi akuntan publik juga dapat mempengaruhi independensinya. Seiring dengan tuntutan untuk menghadirkan suatu proses bisnis yang terkelola dengan baik, sorotan atas kinerja akuntan terjadi dengan begitu tajam. Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan. Meningkatnya persaingan tersebut membuat para akuntan publik menjadi lebih sulit berperilaku secara profesional, dan membuat banyak kantor akuntan publik lebih berkepentingan untuk mempertahankan klien dan laba yang besar.

Terjadinya kasus–kasus kegagalan auditor berskala besar seperti kasus Enron di Amerika Serikat, yang terdeteksi melakukan manipulasi laporan keuangan seperti Kasus Enron melibatkan kantor akuntansi publik Arthur Andersen, manajemen Enron telah melakukan *window dressing* dengan cara menaikkan pendapatannya senilai US \$ 600 juta dan menyembunyikan utangnya sebesar US \$ 1,2 miliar dengan teknik *off-balance sheet*. Auditor Enron, Arthur Andersen kantor Huston dipersalahkan karena ikut membantu proses rekayasa laporan keuangan selama bertahun-tahun. Arthur Andersen juga dipersalahkan karena telah melakukan pemusnahan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron. Seharusnya

Arthur Andersen bekerja dengan penuh kehati-hatian sehingga informasi keuangan yang telah diauditnya dapat dipercaya tidak mengandung keragu-raguan.

Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang di tandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US \$ 31.2 milyar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat.

Sumber:(<https://search.kompas.com/search/?q=kasus+enron+corporation+dan+arthur+endersen&submit=Submit>)

Fenomena yang terjadi di dalam negeri mengenai independensi akuntan publik salah satunya yaitu KPMG Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menerima permintaan dari kliennya dengan menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 ribu. Sebagai siasat,

diterbitkannya faktur palsu untuk biaya jasa professional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York.

Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang menyusut drastis. Dari semula US\$ 3,2 juta menjadi hanya US\$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaan. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, menjertnya dengan undang-undang anti korupsi. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak jujur karena KPMG melanggar sikap independensi juga prinsip professional dimana dia menyuap aparat pajak untuk melindungi demi kepentingan kliennya. (18 September 2007) www.wordpress.com

Kasus pelanggaran sikap independensi yang dilakukan akuntan publik terjadi pada salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung. Kantor Akuntan Publik (KAP) RR pernah mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun. Klien yang sama tersebut adalah PT. P. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Dan Kantor Akuntan Publik (KAP) RR itu jelas telah melanggar independensi karena mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun. (Sumber : Supervisor KAP RR, 2010).

Fenomena selanjutnya Ketentuan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam KMK tersebut tertulis bahwa akuntan publik hanya boleh mengaudit klien yang sama maksimal 3 tahun berturut-turut dan untuk kantor akuntan publik (KAP) paling lama lima tahun.

Bisa jadi ketentuan tersebut dikeluarkan memang karena desakan berbagai kalangan yang sering kali menuding para akuntan publik tidak lagi independen dalam memberikan opininya. Bahkan, ketidakprofesionalan dan ketidakindependenan mereka dalam melakukan audit disinyalir sebagai salah satu penyebab ambruknya perbankan. Pasalnya, akuntan publik dinilai telah gagal dalam memberikan peringatan terhadap kondisi keuangan perbankan.

Seperti diketahui umum, skandal akuntansi yang dilakukan oleh sepuluh KAP yang telah mengaudit 38 bank-bank berstatus BBU (Bank Beku Kegiatan Usaha) dengan melakukan pelanggaran audit lebih dari lima tahun hanya diganjar sanksi administratif oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP). Padahal, pelanggaran yang dilakukan oleh para akuntan tersebut bisa dibilang berat dan nyata-nyata menunjukkan ketidakprofesionalan mereka dalam melakukan audit terhadap kliennya. BP2AP memberikan sanksi yang melarang 10 auditor mengaudit perbankan selama satu tahun plus mengikuti kursus lanjutan di IAI selama ratusan jam. diberi tambahan pembekuan keanggotaan IAI selama enam bulan juga membekukan izin praktek auditor selama enam bulan.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6778/font-size1-colorff0000bpembatasan-periode-audit-akuntanbfontbrbelunggu-atau-celah-baru-bagi-akuntan-untuk-berkolusi>

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik adalah sebagai berikut:

1. Audit fee yang diteliti oleh Supriyono (1988), Merry Setiawaty (2004), dan Prabowo (2011).
2. Pemberian jasa lain selain audit terhadap independensi akuntan publik diteliti oleh, Agnes dan Pinnarwan (2013), Ardiani & Ricky (2011) dan Sunasti. (2013).
3. Tingkat persaingan antar kantor akuntan publik diteliti oleh Knapp (1985), Shockley (1981) dan Gul (1989)
4. Lamanya hubungan audit dengan klien diteliti oleh Sulardi (2005), Kasidi dan Mery Setiawaty (2009).
5. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha klien diteliti oleh Mariyati dan Arisudhana (2012)
6. Ukuran kantor akuntan publik oleh Nichols and Smith (2002), Shockley and Hold (2004).

Tabel 1.1
Penelitian yang mempengaruhi aktor-faktor Independensi Akuntan Publik

Nama Peneliti	Tahun	Audit fee	Pemberian jasa lain selain audit	Tingkat persaingan antar KAP	Lamanya hubungan audit dengan klien	Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha	Ukuran Kantor akuntan publik
Supriyono	1988	✓					
Merry Setiawaty	2004	✓					
Prabowo	2011	✓					
Agnes dan Pinnarwan	2013		✓				
Ardiani dan Ricky	2011		✓				
Sunasti	2013		✓				
Knapp	1985			✓			
Shockley dan Gul	1989			✓			
Sulardi	2005				✓		✓
Kasidi dan Merry Setiawaty	2009				✓		
Mariyati dan Arisudhana	2012					✓	
Nichols and Smith	2002						✓
Shockley and Hold	2004						✓

Penelitian ini merupakan replikasi dari 2 (dua) penelitian yaitu: Jimmy Abadi dan Widi Hidayat “Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Komitmen Profesional, *Tenure of The Audit Firm*, dan Persaingan antar Kantor Akuntan Publik Terhadap

Independensi Akuntan Publik”, dan M. Sukamdani yang berjudul “Pengaruh Ukuran KAP, Fee Audit, Hubungan Dengan Klien, Komitmen Profesional dan Persaingan antar KAP Terhadap Independensi Kantor Akuntan Publik”

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jimy Abadi dan Widi Hidayat (2011) yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Komitmen Profesional, *Tenure of The Audit Firm*, dan Persaingan antar Kantor Akuntan Publik Terhadap Independensi Akuntan Publik”. Variabel independen yang digunakan pada penelitian Lokasi penelitian di Kantor Akuntan Publik Bandung. Unit analisis pada penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di KAP Kota Bandung dengan variabel yang diteliti yaitu efektivitas komite audit, komitmen professional, tenur kantor akuntan publik, dan persaingan antar kantor akuntan publik. Saat ini jumlah auditor yang terdaftar di BI sebanyak 151. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah teknik pengambilan data survei.

Jumlah sampel yang diteliti yaitu 32 auditor dengan menetapkan kriteria auditor yang berpengalaman serta kantor akuntan publik yang telah terdaftar. Hasil penelitian ini adalah efektivitas komite audit, komitmen professional, tenur kantor akuntan publik, dan persaingan antar kantor akuntan publik terbukti berpengaruh dalam meningkatkan independensi akuntan publik pada auditor kantor akuntan publik Kota Bandung. Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada saat menyebarkan kuesioner berfokus pada responden auditor yang bekerja di kantor akuntan publik dan tingkat pengembaliannya kuesioner maksimal agar diperoleh hasil yang lebih baik.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jimy Abadi dan Widi Hidayat (2011) yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Komitmen Profesional, *Tenure of The Audit Firm*, dan Persaingan antar Kantor Akuntan Publik Terhadap Independensi Akuntan Publik” Lokasi penelitian di Kantor Akuntan Publik Surabaya. Tahun penelitian dilakukan pada tahun 2011. Target yang digunakan dalam penelitian ini yaitu staf auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 Kantor Akuntan Publik yang ada di Surabaya dari situs IAPI maka ditetapkan jumlah sampel minimum 30 responden untuk kantor akuntan publik. Hasil penelitian ini adalah Efektivitas komite audit, komitmen profesional, *Tenure of the audit firm*, dan Persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik.

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Jimy Abadi dan Widi Hidayat (2011) perbedaan yang pertama yaitu tentang faktor yang mempengaruhi independensi, pertama, variabel yang digunakan, penelitian ini hanya menggunakan variabel efektivitas komite audit, *tenure of the audit firm*, dan persaingan antar kantor akuntan publik, serta ada sebuah variabel baru yang pertama kali diuji pengaruhnya terhadap independensi akuntan publik yaitu komitmen profesional. Kedua, waktu penelitian, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Ketiga, lokasi penelitian dilakukan di kota Bandung, Indonesia.

Berdasarkan pada penjelasan diatas terdapat adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian terdahulu,

maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul: “**Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Komitmen Profesional, Tenor Kantor Akuntan Publik, dan Persaingan antar Kantor Akuntan Publik Terhadap Independensi Akuntan Publik**”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik yang telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan diantaranya yaitu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. Maka sebagai seorang akuntan publik seharusnya menjalankan tugas dengan berdasar pada etika profesi yang ada.
2. Akuntan Publik yang tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data.
3. Selain itu Akuntan Publik juga melanggar prinsip standar teknis karena tidak melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.
4. Dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*)

dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

1.2.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Komite Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana Komitmen Profesional pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana Tenur Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana Persaingan antara Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Bagaimana Independensi Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Komite Audit, Komitmen Profesional, Tenur Kantor Akuntan Publik, Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik Secara Parsial terhadap Independensi Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh Efektivitas Komite Audit, Komitmen Profesional, Tenur Kantor Akuntan Publik dan Persaingan Antar Kantor

Akuntan Publik Secara Simultan terhadap Independensi Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Efektifitas Komite Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Komitmen Profesional pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Tenur Kantor Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektifitas Komite Audit, Komitmen Profesional, Tenur Kantor Akuntan Publik dan Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik Secara Parsial terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Efektifitas Komite Audit, Komitmen Profesional, Tenur Kantor Akuntan Publik dan Persaingan Antar Kantor Akuntan Publik secara simultan terhadap ketepatan pemberian opini auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai auditing.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.
3. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis atau pembaca khususnya dalam pengimplementasian ilmu auditing.

1.4.2 Kegunaan Praktisi / Empiris

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana memahami perbandingan antara disiplin ilmu khususnya teori dan konsep-konsep indenpendensi akutan publik yang dipelajari dengan penerapannya dalam suatu organisasi.

b. Bagi Perusahaan / Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang akan menjadi dasar untuk pengevaluasian kinerja organisasi.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh KAP tersebut yaitu dimulai pada bulan maret tahun 2018 sampai dengan selesai.